

**STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
KABUPATEN BOYOLALI MELALUI PENDIDIKAN POLITIK UNTUK
MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH**

Raihana Lutfiah Nabila¹, Sarbini²

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

E-mail: raihanalunab@gmail.com

Abstrak

Pemilu menjadi salah satu kegiatan demokrasi sesungguhnya untuk mencapai Indonesia yang lebih baik. Sebagai warga negara Indonesia, menjadi hal yang paling amplifikasi untuk memperjuangkan hak suaranya pada kegiatan demokrasi, di lain pihak, terdapat beberapa keterbelitan pemilih di dunia demokrasi dalam menggunakan hak suara. Akibatnya, sebagai perantara antara lembaga dengan masyarakat maka KPU Kabupaten Boyolali memberikan wawasan dan informasi terkait pendidikan politik, yang selanjutnya menegaskan kegiatan untuk membangun semangat pemilih pada saat Pemilu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif pemilih makin meningkat setiap pelaksanaan Pemilu Legislatif, hal ini berdasarkan pada konsep “*Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect?*” dengan dibuktikan bahwa KPU Kabupaten Boyolali berhasil mempertahankan kenaikan sebanyak tiga kali lipat daripada tahun sebelumnya untuk pemilih menggunakan hak suaranya. Selama meningkatkan partisipasi aktif pemilih, KPU Kabupaten Boyolali melakukan strategi komunikasi dengan melakukan pendidikan politik melalui sosialisasi dan kunjungan P5 ke beberapa sekolah bersama pelajar sebagai pemilih pemula, kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, dan difabel. Komunikasi melalui media massa, seperti; *YoutuTube*, *Instagram*, dan *Facebook* juga dilakukan guna membuat stimulus khalayak agar tetap menggunakan hak suaranya.

Kata kunci: strategi komunikasi; partisipasi aktif; pemilih

Abstract

General Elections (Pemilu) have become one of the essential democratic activities to achieve a more developed Indonesia. As Indonesian citizens, it is paramount to amplify efforts to advocate for their voting rights in democratic processes to use their voters. On the other hand, there are several complexities for voters in the world of democracy. Consequently, as an intermediary between institutions and the community, the Boyolali Regency General Election Commission (KPU) provides insights and information related to political education, further emphasizing activities to foster the spirit of voters during the Elections. The results of this research indicate that active voter participation is increasing with each implementation of the Legislative General Elections. This is based on the concept of "Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect?" It has been evidenced that the Boyolali Regency General Election Commission (KPU) has

successfully maintained about three times increase in voters exercising their voting rights. While boosting active voter participation, the Boyolali Regency KPU employs communication strategies through political education via socialization and Pancasila Student Profile Strengthening Project (P5) visits to several schools, involving students as first-time voters, community groups, community leaders, and people with disabilities. Communication through mass media platforms such as YouTube, Instagram, and Facebook are also conducted to encourage the audience to continue exercising their voting rights.

Keywords: *communication strategy, active participation, voters*

PENDAHULUAN

Pemilu Legislatif memulai babak baru dan sangat penting dilakukan bagi pemilih sebagai representatif yang responsif dan akurat terhadap keaktifan partisipasi pemilih. Tetapi, fenomena yang terjadi dilapangan terlihat bahwa masih minimnya informasi terkait pendidikan politik antara pemilih, sehingga menghambat pada proses pemilu legislatif. (Nimmo, n.d.) menyebut pendidikan politik sebagai kegiatan yang dapat membantu pemilih memahami pentingnya suara mereka ketika menentukan kebijakan yang responsif bagi para pemimpin yang dapat mewakili kepentingan mereka.

Menegaskan terkait peningkatan pendidikan politik, maka pemilih akan lebih mudah memahami terkait profil kandidat, memilih informasi yang kredibilitas dari sumber yang terpercaya, dengan harapan dapat membuat keputusan yang rasional dalam pemilu. Adanya pendidikan politik yang berjalan secara efektif dapat menumbuhkan kesadaran terkait pentingnya partisipasi aktif pemilih pada Pemilu, sehingga menciptakan rasa tanggung jawab terhadap pilihan mereka.

Berdasarkan pemikiran tersebut, tumbuhnya semangat untuk meningkatkan partisipasi pemilih aktif pada Pemilu Legislatif, salah satunya dengan mewujudkan kegiatan yang dilakukan di masyarakat melalui program-program literasi politik. Dengan begitu, pendekatan sosial kepada partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif perlu adanya peningkatan, sehingga tumbuh legitimasi dan akuntabilitas proses demokrasi secara keseluruhan.

Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi sarana sebagai bentuk realisasi dari sila keempat Pancasila menyebutkan, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Menurut (Kusnardi & Ibrahim, 2010) dalam bukunya menyebutkan bahwa Pemilu adalah proses perolehan suara pada kursi-kursi yang akan dimenangkan oleh partai politik atau calon legislatif. Partisipasi politik merupakan peranan yang penting untuk menjaga stabilitas pada kesejahteraan masyarakat yang menjadi tolak ukur pada perkembangan dinamika demokrasi modern ini (Pedesaan et al., n.d.). Sebagai warga negara yang responsif dan demokratis perlu melakukan pembelajaran untuk melaksanakan Pemilu agar dapat menghindari keberpihakan dalam konflik umum terbuka dan terus mengikuti keikutsertaan ketika menentukan kebijakan publik (Kantaprawira, 2006).

Pendidikan politik menjadi sebuah proses kesadaran dari sosialisasi politik masyarakat yang terjadi untuk memahami dan mengorganisir nilai-nilai yang terkandung pada sistem politik yang ideal, dalam prosesnya terdapat penurunan proses nilai-nilai dan norma dari ideologi suatu negara yang dilakukan secara sadar dan berlangsung kontinu (Anwar et al., 2021). Dalam Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan terkait hak warga negara yang mendasar adalah dengan mempergunakan hak suaranya. Selain itu pengaturan hak warga negara untuk memilih dan dipilih juga termuat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik. Pemilihan umum menjadi salah satu indikator untuk kestabilan lingkup penyelenggaraan pemilu pada partisipasi politik yang selalu berproses setiap tahunnya. Maka dari itu, hingga dewasa ini, sistem politik yang terjadi selalu ada perubahan dari orde baru hingga masa reformasi (Junaedi, 2019).

Pendidikan politik menjadi fokus utama untuk meningkatkan partisipasi politik rakyat dengan tujuan untuk bersikap kritis pada kondisi lingkungan pada situasi sosial politik yang penuh konflik ini (Iskandar & Marlina, 2019), sehingga perlu adanya pembelajaran yang aktif dan responsif guna membentuk kepribadian seseorang yang cerdas untuk membentuk masyarakat dapat menunjukkan kondisi demokratis yang berkualitas (SETKAB, 2022). Pendidikan politik menjadi aspek pemahaman politik yang sangat krusial, karena berkaitan dengan mengambil keputusan di era perselisihan konflik-konflik pada aktivitas komunikasi politik yang memengaruhi khalayak (Nimmo, 2010).

Konsep klasik demokrasi dijelaskan sebagai bentuk sistem pemerintahan yang telah melibatkan partisipasi oleh banyak pihak “*rule by the money*” atau bentuk pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat “*rule by the people.*” Pelaksanaan demokrasi berfokus pada pertimbangan kepentingan mayoritas atau orang banyak, sehingga keberadaan KPU Kabupaten Boyolali sangat dibutuhkan untuk mendukung masyarakat berpartisipasi pada aktivitas politik. Dengan begitu, akan sejalan dengan perspektif dari Abraham Lincoln dalam pidatonya mengatakan bahwa “*democracy mean the rule of the people*” di mana “*pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat*” (Cangara, 2016).

Proses kegiatan pendidikan politik sangat dibutuhkan bagi masyarakat tentang pemahaman sikap sosio politik, agar nantinya tujuan politik tersampaikan melalui pesan politik berdasarkan riset-riset perilaku dalam memperoleh informasi yang jelas, menambah wawasan, dan rasa ingin tahunya semakin tinggi (McNair, 2010), serta memiliki keterampilan ketika bersikap dan lebih terarah lagi ketika melakukan akselerasi diri pada setiap kondisi (Subiakto, 2015). Wilayah yang terletak di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Boyolali selalu mengadakan pemilu setiap tahunnya secara berkala, indikator yang didapatkan berupa partisipasi pada setiap pemilu. Partisipan menjadi objek yang sangat penting untuk kesehatan demokrasi di tingkat lokal. Dengan begitu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali menjadi lembaga yang bertanggung jawab pada masyarakat untuk menyelenggarakan pemilu di daerah lokal, memiliki peranan yang

Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali Melalui Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih

sangat krusial pada saat memberikan pendidikan politik dalam meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu (Affandi et al., n.d.).

Mengusung visi agar menjadi penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL, KPU Kabupaten Boyolali sebagai lembaga penyelenggara Pemilu diharapkan berhasil untuk membawa perubahan dalam menciptakan partisipasi aktif pada partisipasi pemula, organisasi masyarakat, kelompok perempuan, dan kelompok difabel. Keberadaan KPU Kabupaten Boyolali pada pihak tertentu membentuk sebuah pemikiran terkait dasar yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif terhadap strategi komunikasi yang dilakukan.

Adanya KPU Kabupaten Boyolali sebagai lembaga penyelenggara pemilu untuk menyebarkan informasi Pemilu Legislatif, dalam hal ini dikonsepsikan pada teori Harold D. Laswell (Drew, 2023) dengan mengidentifikasi pandangan strategi komunikasi yang dilakukan agar membentuk konstruksi sosial-demokrasi yang menunjukkan pada pemahaman Pemilu Legislatif untuk pemilih pemula. Pembentukan identitas dari partisipasi pemilih pemula aktif pada hakikatnya sulit untuk terlepas dari sebuah proses komunikasi yang terjadi saat melakukan sosialisasi atau kunjungan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boyolali, adanya konstruksi sosial-demokrasi lebih lanjut diketahui terkait bagaimana strategi komunikasi yang telah dilakukan dan penerimaan pesan masyarakat agar mampu berkontribusi pada Pemilu Legislatif 2024.

Untuk mendukung analisis data, maka pendekatan teori yang digunakan adalah.

1. Proses komunikasi, penyebaran pesan yang dilakukan lebih dari dua orang dengan melibatkan pengembangan transmisi ide pesan.
2. Isi pesan yang disampaikan, melalui perkataan, visualisasi gambar, atau kampanye.
3. Penggunaan media.
4. Interaksi audiens.
5. Dampak penyebaran pesan, diperoleh berdasarkan interaksi masyarakat pada saat penerimaan pesan yang dilakukan oleh komunikator.

Peneliti memiliki pandangan bahwa terdapat kebutuhan yang sangat urgensi terkait model pendidikan politik bagi khalayak. Oleh karena itu, fokus kajian penelitian yang akan dilakukan mengenai strategi komunikasi yang dilakukan KPU Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan pemahaman politik. Urgensi penelitian ini didasarkan pada kebutuhan aspek masyarakat yang dipengaruhi oleh kondisi perkembangan isu kebijakan politik. Sementara di sisi lain menimbulkan sebuah pertanyaan dari adanya kebijakan isu politik ini dalam mempertahankan pemahaman masyarakat lokal.

Beberapa penelitian sebelumnya (Adistyraningsih et al., 2019) telah dilakukan mengenai strategi komunikasi yang digunakan oleh KPU dalam meningkatkan partisipasi pada pemilihan umum kepada daerah kabupaten Gianyar. (Sari & Farid, 2021) melakukan penelitian terkait strategi komunikasi KPU Kabupaten Bantul dalam sosialisasi pemilihan kepala daerah. Berdasarkan literatur terdahulu menjelaskan terkait strategi komunikasi yang digunakan oleh lembaga penyelenggaraan pemilu dengan melakukan kampanye

melalui media sosial, debat publik, sosialisasi di sekolah, dan penyuluhan bagi pemilih yang potensial. Dengan begitu, penelitian tersebut dipengaruhi oleh faktor budaya politik masyarakatnya, perkembangan arus teknologi dan informasi, serta tingkat literasi politik bagi partisipan.

Adanya keterbaruan kajian yang peneliti lakukan, yaitu; *pertama*, fokus kajian peneliti terdapat pada kebutuhan pesan yang disampaikan kepada partisipasi pemilih dalam menerima pendidikan politik. *Kedua*, kebutuhan pendidikan politik sangat diperlukan untuk meningkatkan demokrasi negara Indonesia agar lebih berkualitas khususnya pada daerah lokal, yang menjadi dasar permasalahan penelitian ini adalah partisipasi pemilih pemula kurangnya mendapatkan pendidikan politik agar dapat berkontribusi aktif pada proses demokrasi. Sehingga terdapat rumusan masalah yang teridentifikasi pada penelitian ini berupa “Bagaimana efektivitas dari strategi komunikasi yang dilakukan KPU Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan pemahaman politik melalui pendidikan politik?” Berdasarkan masalah tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait metode efektif yang digunakan KPU Kabupaten Boyolali untuk menyampaikan pesan-pesan politik kepada masyarakat Kabupaten Boyolali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. (J. Moleong, 2014) memaknai terkait metode penelitian ini dilakukan untuk melihat fenomena yang sedang terjadi, melalui sudut pandang yang berasal dari subjek penelitian, seperti; pelaku, motivasi, persepsi, dan tindakan. Sehingga penelitian ini akan dideskripsikan melalui transkrip teks secara alamiah yang diperoleh dari hasil wawancara (Grace, 2017). Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan cara memilih sampel yang dipilih berdasarkan variabel dari informan (Cangara, 2016). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi komunikasi yang dilakukan KPU Kabupaten Boyolali dalam melakukan pendidikan politik. Dengan begitu, metode kualitatif deskriptif sangat tepat digunakan untuk menjabarkan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2023. Waktu penelitian disesuaikan dengan kondisi informan di lokasi. Lokasi penelitian ini berada di wilayah Siswodipuran, Kec. Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. (Sugiyono, 2016) menjelaskan terkait data primer merupakan sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data terkait data yang dibutuhkan. Maka dari itu, penulis mendapatkan data primer dari anggota KPU Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi dan anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara berdasarkan data yang ada di lapangan. Untuk data sekunder dari berkas dokumen KPU Kabupaten Boyolali, literatur yang diakses melalui buku, artikel, internet, serta dokumentasi kegiatan yang didapatkan dari KPU Kabupaten Boyolali. Sehingga, metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini dengan: (1) wawancara, yaitu melakukan sesi tanya jawab dengan dua informan di KPU Kabupaten Boyolali; (2) observasi, yaitu metode yang dilakukan secara subjektif bersama dengan anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara; dan (3) studi

literatur, yaitu dengan menambahkan data yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan berdasarkan informasi yang didapatkan dari sumber artikel daring dan buku (Sugiyono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

(Huntington et al., 2013) menjelaskan terkait partisipasi politik menjadi aspek paling penting dari demokrasi. Setiap individu memiliki keputusan politik yang telah dibuatnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah akan memengaruhi kehidupan warga negara, sehingga warga negara berhak turut serta menentukan keputusan politik yang memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dalam partisipasi. Adanya pembentukan proses politik yang pada hakikatnya akan bersifat dialektis berkenaan dengan hubungan interaksi antara partisipasi pemilih pemula dengan interaksi KPU Kabupaten Boyolali memuat aspek peningkatan dalam setiap Pemilu. Peningkatan angka partisipasi ini menjadi pokok utama dalam sosialisasi di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu (Junaedi, 2019).

Keberadaan masyarakat dalam memberikan hak suaranya merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam demokrasi (Carvalho & Dryden-Peterson, 2024). Bagaimana setiap pemilih pemula menggunakan hak suaranya, berkomunikasi terkait isu demokrasi, dan saling bertukar pikiran terhadap perspektif dari masing-masing individu melalui penerimaan pesan yang disampaikan komunikator, dengan respons yang sangat mudah melalui media dua arah dengan interaktivitas secara tepat dari kata-kata tertulis maupun lisan, dengan tujuan memengaruhi fenomena pemasaran politik. Sehingga kaitannya dengan penelitian ini, unsur komunikasinya menggunakan paradigma Lasswell dengan menjelaskan komunikasi, sebagai berikut; “*Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect?*”

Pemilih aktif dalam Pemilu Legislatif membentuk subjek pelaku utama dalam sebuah identitas di lingkup komunikasi yang dibentuknya. Sebagai pemilih pemula pada kegiatan demokrasi yang subjektif harus bisa reflektif dengan situasi yang ada di lingkungan tersebut, atas dasar tindakan yang diberikan melalui kecenderungan impulsif dalam berperilaku melalui cara yang tidak dapat diorganisasikan, kehilangan arah, dan bersifat spontan (Heryanto, 2018).

Secara konseptual, pemilih yang berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi telah memahami diri sebagai suatu objek ataupun legalitas komunikasi yang terjalin dengan sikap orang lain disekitarnya, maka memungkinkan individu ini berperan di kegiatan sosial dengan menjadi dirinya sendiri yang secara terus-menerus diawasi pada suatu kelompok tertentu (Bakhri, 2021).

Bauran kompleks pendidikan politik yang memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi menjadi warga negara yang aktif dan efektif, maka warga komunitas perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan tindakan dalam kehidupan mereka yang kaitannya dengan politik lokal, nasional, dan internasional. Sehingga kemampuan dari sebuah lembaga untuk berpartisipasi dalam distribusi sebuah informasi menjadi konstituen informasi agar dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan kekuatan pendidikan

politik dalam upaya menggugah kesadaran hingga mengubah perilaku khalayak terkait pentingnya pemilih yang cerdas dan rasional. Sehingga, tindakan yang diberikan dapat memerangi hoaks agar tidak terkontaminasi oleh informasi yang membuat *counter* narasi untuk tidak melakukan pemilihan pada kegiatan Pemilu Legislatif (Macrae, 2004).

Peran KPU Kabupaten Boyolali telah memahami peran dan karakteristiknya untuk mendorong penyebaran informasi kepada pemilih pemula untuk ikut serta dalam Pemilu Legislatif. Maka dari itu, sejumlah kegiatan yang capai dalam kegiatan pendidikan politik antara lain:

1. Melakukan pendidikan politik kepada pemilih pemula, kelompok perempuan, organisasi masyarakat, dan kelompok difabel dengan sistem sosialisasi kegiatan dan bauran informasi melalui media digital.
2. Keaktifan yang ditunjukkan pada setiap pemilih pemula di seluruh golongan yang harapannya dapat menunjang pemahaman terkait makna dari demokrasi.
3. Membangun hubungan sosial kepada kelompok masyarakat dengan melakukan edukasi terkait visi-misi yang rasional pada setiap calon legislatif dan bimbingan materi.

Posisi KPU Kabupaten Boyolali sebagai lembaga penyelenggara Pemilu sebagai komunikator pesan yang bertugas memberikan edukasi terkait pesan informasi Pemilu, baik itu berupa sosialisasi, sebagai pembicara kegiatan, penyuluhan, maupun pembina upacara dalam sebuah kegiatan. Pembuat atau pengirim pesan disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan tentang demokrasi, hiburan, informasi, atau nasihat. Dalam hal ini, komunikator menjadi aktor utama dalam mengelola pesan agar dapat disampaikan dengan baik kepada komunikan (Rahman & Munadi, 2019).

Kehadiran dari komunikator dalam melakukan penyebaran pesan secara bebas dan jujur menjadikan seorang komunikator ini memiliki pandangan yang luas dan lengkap sesuai dengan tujuan yang direncanakan untuk mampu menyesuaikan dan mengkoordinasi perilaku terhadap lawan bicara atau khalayak (Asri et al., 2022). Sehingga, kemampuan komunikator dalam mengelola pesan perlu adanya strategi khusus untuk menghasilkan hubungan yang baik antar individu.

Berdasarkan uraian di atas, maka peran KPU Kabupaten Boyolali sebagai penyelenggara Pemilu Legislatif memiliki peran berdasarkan karakteristik yang meyakinkan mereka sebagai komunikator. Sehingga, KPU Kabupaten Boyolali memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keaktifan guna mendukung tanggung jawab sebagai komunikator. Sejumlah analisis dalam proses mengelola pesan untuk mengetahui peran KPU Kabupaten Boyolali sebagai komunikator pesan, adalah:

1. Strategi Penyampaian Pesan

KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan sejumlah informasi secara langsung kepada pemilih pemula melalui program pendidikan dari KPU melalui P5 (Proyek Penguatan Profil Pelajar), melakukan diskusi kepada calon pemilih dengan melakukan kunjungan RPP (Rumah Pintar Pemilu), menjadi pembina upacara di

sekolah, dan melakukan sosialisasi untuk memastikan calon pemilih untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Penyusunan strategi yang dilakukan dengan menarik simpati khalayak dengan menyusun secara eksklusif visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategi KPU yang menjadi pendukung dalam proses pendidikan pemilih.

Adanya strategi penyampaian pesan oleh KPU Kabupaten Boyolali mengarah pada logika pesan informatif, di mana penyampaian pesan yang diterima oleh pemilih pemula mampu menciptakan inisiatif dan negosiasi dengan lingkungan sosial yang mencakup aspek dari individu tersebut. Upaya ini dapat menciptakan tatanan, bagaimana pemilih pemula mengelola sebuah pesan agar mampu berperan sebagai sesuatu yang bisa berkontribusi pada kegiatan Pemilu Legislatif sesuai dengan pandangan politik mereka masing-masing.

2. Alur Penyampaian Pesan

Upaya untuk memastikan partisipasi aktif pemilih pada setiap Pemilu berlangsung, maka implementasi alur penyampaian pesan ini menitikberatkan pada cakupan pendekatan inklusif, edukatif, dan partisipatif. Pertama, KPU Kabupaten Boyolali secara aktif melakukan pendidikan politik dengan menyelenggarakan Sosialisasi Pemilu melalui kegiatan *Car Free Day* (CFD) berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada kegiatan Rapat Kerja Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Boyolali, Sosialisasi Rancangan Penyederhanaan Surat Suara Pemilu Tahun 2024, dihadiri pengurus partai politik, organisasi masyarakat, kelompok pemilih.

Selain itu, melalui kolaborasi dengan lembaga masyarakat sipil dan lembaga pendidikan KPU Kabupaten Boyolali melakukan kemitraan yang kuat untuk mendorong partisipasi aktif pemilih, terutama di kalangan generasi muda dengan strategi komunikasi yang terintegrasi dan terarah, KPU Kabupaten Boyolali telah berhasil membentuk kesadaran politik, mendorong partisipasi aktif dengan kegiatan KPU Goes to School dengan tema Partisipasi Pemilih Pemula untuk Pemilu Tahun 2024 dalam rangka peningkatan partisipasi dan pendidikan pemilih pemula untuk menyongsong Pemilu Tahun 2024, melakukan kegiatan Pendidikan Pemilih SMK N 1 Selo, SMA N 1 Teras, SMA BK 6 Boyolali, SMK Tama Ganesha Boyolali, SMK N 1 Musuk, SMK N 1 Nogosari, SMA N 3 Boyolali, SMP N 2 Mojosongo, SMA N 1 Ampel, dan SMP N 2 Banyudono yang dihadiri setiap sekolahnya lebih dari 70 siswa, dalam proses penyampaian pesan, sebagai pihak lembaga mengajak untuk bermain Ular Tangga Demokrasi sebagai salah satu cara yang dilakukan KPU Boyolali untuk memberikan pengetahuan tentang demokrasi dan pemilu dengan permainan yang menyenangkan dan menekankan pentingnya hak suara sebagai salah satu pilar utama demokrasi yang kokoh.

3. Saluran komunikasi

Komunikasi melalui media massa modern, meliputi surat kabar dengan sirkulasi yang sangat luas, meliputi siaran radio dan televisi yang ditujukan kepada umum.

Lazimnya media massa modern ini digunakan kepada pengikut-pengikut menyangkut penyebaran pengaruh (Ruliana & Lestari, 2019).

Dalam proses penyampain pesan yang diidentifikasi terdapat dua jenis saluran komunikasi, yaitu, saluran komunikasi non-media dan saluran komunikasi media. Saluran komunikasi non-media mencakup forum komunikasi seperti sosialisasi dengan calon pemilih dan calon pra-pemilih, menghadiri undangan menjadi pembina upacara di beberapa sekolah di Boyolali. Di sisi lain, saluran komunikasi media terdiri dari *YouTube*, *Instagram*, *Facebook*, dan laman *Website* yang digunakan dalam proses penyebaran pesan.

4. Hambatan penyampaian pesan

Adanya kendala dalam penyampaian pesan berkaitan dengan pertukaran informasi secara personal, terutama terkait keterbatasan pemahaman materi yang disampaikan kepada komunikan yang mana posisinya di sini ialah siswa dan/atau calon pemilih, serta tingkat responsif pemilih pemula terhadap informasi yang disampaikan oleh anggota KPU Kabupaten Boyolali.

Penelitian ini bermaksud menjelaskan terkait penerimaan pesan dalam konteks komunikasi secara langsung di masyarakat yang telah disampaikan KPU Kabupaten Boyolali, apakah kemudian para pemilih berpartisipasi aktif dan dapat membuka wawasan pemikiran dengan Pemilu dan prinsip-prinsip demokrasi. Keberadaan KPU Kabupaten Boyolali merujuk pada bentuk pengembangan sistem demokrasi di daerah lokal dengan program yang edukatif dan interaktif.

1. Menjalankan fungsi dan peran sebagai kelembagaan Pemilu Legislatif melalui kegiatan Kirab Pemilu 2024

Menjalankan fungsi dan peran sebagai institusi Pemilu Legislatif diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam proses pemilu dengan memberikan hak suara mereka. Dalam konteks ini, Kirab Pemilu 2024 menjadi sarana yang sangat penting bagi pendidikan politik dan penanaman kesadaran politik di kalangan pemilih pemula, karena dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menentukan masa depan demokrasi negara dengan membentuk kebiasaan dalam proses demokrasi dan terlibat tanggung jawab secara politik di masa depan.

2. Bentuk KPU *Goes to School* yang diberlakukan melalui program pendidikan KPU Kabupaten Boyolali melalui P5

Program KPU *Goes to School* menjadi upaya yang efektif dari KPU Kabupaten Boyolali yang ditunjukkan kepada pemilih pemula, upaya ini untuk mendekatkan edukasi dan pemahaman terkait Pemilu terkait pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi, di kalangan pelajar. Kegiatan ini juga diberlakukan di Pesantren Dawar Albaaba Mojosongo, Boyolali dalam memberikan pemahaman proses kebijakan hak suaranya, KPU Kabupaten Boyolali melaksanakan program KPU *Goes to Pesantren*. Strategi komunikasi yang diterapkan melalui aktifnya program ini mencakup penggunaan materi yang interaktif disesuaikan dengan kebutuhan dan pemahaman

target audiens dengan penggunaan teknologi yang relevan agar menarik minat dan perhatian pemula. Kerap kali KPU Kabupaten Boyolali menampilkan dokumenter terkait proses Pemilu kepada para pelajar guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya hak suara mereka.

3. Membuka peluang bagi pemilih pemula untuk berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kabupaten Boyolali

Dalam hal ini, peserta kunjungan menunggu antrian. Selama 15 menit kedepan akan diputarkan film-film kepemiluan dan dokumentasi di Ruang Audio Visual dan ditampilkan materi-materi kepemiluan dan demokrasi selama 10 menit di Ruang *Display*/Pameran. Selanjutnya, peserta kunjungan akan diajak untuk melakukan simulasi proses kepemiluan di Ruang Simulasi Pemilihan selama 50 menit, dan sesi terakhir peserta kunjungan di ajak untuk melanjutkan kunjungan ke Ruang Diskusi selama 45 menit untuk melakukan *workshop* dan *forum group discussion* (FGD) dengan para pegiat komunitas Pemilu/demokrasi.

4. Melakukan diskusi dengan pihak yang terlibat untuk mencegah orang yang tidak menggunakan hak pilih atau Golput

Melalui penyelenggaraan diskusi terbuka dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait, KPU Kabupaten Boyolali memfasilitasi dialog dan pertukaran gagasan yang mendalam tentang faktor-faktor yang dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Sehingga penyelenggaraan sosialisasi yang interaktif menjadi kegiatan yang sangat urgensi untuk mendorong interaksi antara KPU Kabupaten Boyolali dengan masyarakat.

Dinamika warga internet (*warganet/netizen*) sangat unik karena memiliki karakteristik yang cair dengan memungkinkan mereka berekspresi secara bebas. Aktivitas yang dilakukan warganet cukup beragam dalam menanggapi pemberitaan politik di dunia maya sehingga membentuk tipologi-tipologi tertentu, seperti; *publicist*, *disseminator*, *propagandist*, dan *hacktivist* (Sobur, 2001). Keragaman itulah yang membuat menarik untuk mengkonstruksikan sebuah citra dengan membuat partisipasi aktif melalui program Inspirasi Demokrasi dan KPU Boyolali *Podcast* melalui *Channel YouTube*. Melalui media sosial juga sangat efektif karena komunikasi yang dilakukan berkesinambungan dengan kegiatan yang dilakukan pada lingkungan sosial.

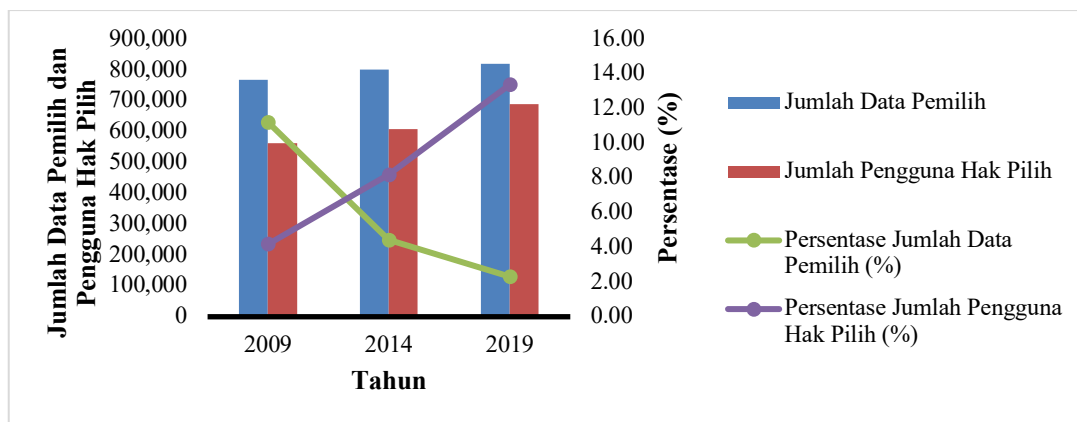
Terkait analisis tersebut, maka konsep strategi komunikasi yang dicanangkan oleh KPU Kabupaten Boyolali berupa legitimasi komunikasi sebagai proses dua arah di mana seorang individu memengaruhi orang lain dalam menerima pesan, dan komunikasi telah melakukan respons terkait pesan yang diberikan (Lasswell, 1960). Pendekatan KPU Kabupaten Boyolali terhadap proses pendidikan politik sangat bijak dalam meningkatkan pemahaman terhadap proses demokrasi yang dilakukan bersamaan dengan penyampaian informasi. Dengan begitu, konsep itu mengarah pada proses strategi komunikasi yang dilakukan berdasarkan kebutuhan pemilih.

Tabel 1 Daftar Pemilih Tetap

Tahun Pemilu	2009	2014	2019
Jumlah Data Pemilih	768.093	802.148	820.701
Jumlah Pengguna Hak Pilih	563.213	609.377	690.979

Saat melakukan pendidikan politik menjadi lebih prosedural, sehingga terjadi praktik demokrasi itu sendiri dari para pemilih. Dalam perspektif penulis, dinamika pendidikan politik yang disebarluaskan kepada masyarakat menghasilkan residu yang dapat melemahkan proses tidak menggunakan hak suaranya atau Golput (Ardani Putram & Fauzi, 2020). Keberadaan KPU Kabupaten Boyolali memiliki peran yang kuat dalam proses demokrasi untuk masyarakat Kabupaten Boyolali dengan menjadikan rangkaian proses pendekatan terkait pendidikan politik dengan informasi yang relevan dengan kebutuhan dari pemilih pemula, KPU Kabupaten Boyolali berhasil memastikan bahwa seluruh komunitas yang terlibat dapat berperan secara aktif dalam proses demokrasi yang berkelanjutan.

Berdasarkan dengan perspektif ini menunjukkan bahwa mayoritas pemilih pemula telah menggunakan hak suara dengan cara memberikan suara, terlihat antusias dengan memberikan hak suaranya pada proses Pemilu, terlihat dari rekapitulasi data yang telah disusun oleh KPU Kabupaten Boyolali dari setiap pemilihan politik. Hal ini tergambar jelas melalui diagram yang disajikan.



Gambar 1 Kenaikan Grafik Pemilih

Guna menghindari kemungkinan bias, maka persentase data di atas telah menunjukkan akurasi data yang tinggi berdasarkan temuan lembaga survei KPU Kabupaten Boyolali dengan penempatan sampel dari tahun 2009, 2014, dan 2019. Dengan demikian, KPU Kabupaten Boyolali berhasil mempertahankan konsistensinya untuk meningkatkan partisipasi Pemilu, sebagaimana tercermin dari kenaikan grafik yang mencapai tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Dengan begitu, terkait data yang ada maka mencerminkan komitmen dari KPU Kabupaten Boyolali dalam memberikan pesan yang informatif dan netral terkait partisipasi Pemilu melalui kerja sama dengan lembaga dan instansi di Kabupaten Boyolali dan melakukan kegiatan secara proaktif kepada partisipasi mula

Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali Melalui Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih

untuk terus memperjuangkan dan menggunakan hak suaranya dengan baik pada proses demokrasi yang berlangsung.

KPU Kabupaten Boyolali telah menegaskan terkait kredibilitasnya melalui program-program yang transparansi dan kegiatan tersebut harus berkelanjutan untuk mendorong partisipasi masyarakat pada setiap proses demokrasi, dengan tetap memastikan validitas dan akurasi data yang ada. Pendidikan politik lebih jelas dikenal sebagai konsep pemberdayaan melalui pengetahuan yang informatif terkait demokrasi, dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, hukum, dan politik berdasarkan kebutuhan komunikasi (P. Pureklolon, 2016). Pada konteks ini, komunikasi dua arah berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara aspek lembaga dengan aspek masyarakat yang membentuk sebuah makna dan tujuan yang lebih dalam pada setiap prosesnya.

Sementara itu, implementasinya mendukung keterkaitan pihak pemilih pemula untuk menggunakan hak suaranya serta memberikan kesinambungan melalui beberapa kegiatan, seperti: sosialisasi, kirab budaya, KPU *Goes to School* (Pesantren). Lebih lanjut konsep ini mengarah pada konsep komunikasi yang saling memberikan *feedback* satu sama lain, secara potensial dapat dilakukan melalui pengoptimalan pendidikan politik dengan menambahkan informasi yang jelas menggunakan hak asasi, serta secara seimbang mampu menjadi bagian dari masyarakat.

Partisipasi aktif dan pendidikan politik, keduanya memberikan objektivitas yang kuat bagi KPU Kabupaten Boyolali dalam melakukan peran sosialnya di masyarakat, terutama dalam berkontribusi pada demokrasi di Indonesia. Terkait hal tersebut, strategi komunikasi KPU Kabupaten Boyolali telah mengoptimalkan perpanjangan dari pemerintah yang dapat meningkatkan kemampuan pada arah pemikiran tersebut. Aspek lain yang mengarahkan posisi KPU Kabupaten Boyolali mengarahkan pada indikator keberhasilan dan menempatkan sebuah lembaga di daerah lokal menjadi sasaran utama pemilih pemula aktif dalam kegiatan demokrasi.

KPU Kabupaten Boyolali berkaitan erat dengan pembangunan dari pola pikir pemilih pemula dan menjadi patokan terkait tanggung jawabnya dengan melihat bahwa keaktifan pemilih pemula mengetahui waktu Pemilu Legislatif, mengetahui terkait syarat-syarat menjadi pemilih sehingga mendaftarkan dirinya pada Pemilih Tetap yang akan berpartisipasi dalam menggunakan hak suaranya, mendatangi TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang berada di setiap daerahnya, dalam hal ini keaktifan pemilih pemula untuk ikut serta dalam pesta demokrasi tergambar jelas dari indikator keberhasilan data pemilih yang selalu naik setiap pelaksanaan Pemilu Legislatif.

Pendekatan ini sebagai konsep dari hasil kesepakatan (negosiasi) antara khalayak atau dengan lembaga yang memengaruhi. Pendekatan ini dapat dikatakan sebagai pemahaman sosialisasi politik terhadap kebijakan publik. Selain itu, pemikiran ini menjadi sumber yang sangat potensial pada pembangunan strategi komunikasi Lasswell (P. Pureklolon, 2016). Proses ini saling berkaitan dengan membentuk suatu makna atau maksud dengan mengacu pada paradigma konvergensi (dua arah). Bentuk komunikasi dapat dilihat dari beberapa cara: 1) Komunikator politik dengan menyampaikan proses

pesan kepada audiens dan lembaga; 2) Pesan politik yang disebarluaskan dengan bentuk simbol dan verbal berdasarkan pengetahuan demokrasi dan hak suara pemilih; 3) Saluran atau media politik dengan memanfaatkan saluran media yang tepat sasaran kepada warganet dengan penyebaran informasi yang mengikuti perkembangan zaman, tetapi tetap pada penyampaian informasi hak demokrasi pemilih; 4) Penerima pesan politik mampu mengimplementasikan respons yang didapatkan dengan memberikan suara pada Pemilu legislatif; 5) Pengaruh terkait respon yang didapatkan oleh pemilih pemula dapat dipahami dan diterima dengan baik secara personal (Cangara, 2016).

Pemahaman terkait keberadaan KPU Kabupaten Boyolali sebagai lembaga penyelenggara Pemilu Legislatif yang bekerja sesuai dengan arahan pemerintah dan mengacu pada program bentukan KPU RI. Sehingga, ketika pemilih menggunakan hak suaranya dengan baik, maka pelaksanaan program kegiatan pendidikan politik menjalankan tanggung jawab terhadap pengelolaan sistem demokrasi itu sendiri. Maka dari itu dapat menempatkan lembaga penyelenggara yang aktif setiap pelaksanaan Pemilu Legislatif dan tak terhenti pada suatu bentuk kegiatan pendidikan politik secara langsung dan terus mengalami peningkatan, serta perubahan sesuai dengan sistematika demokrasi.

KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan berdasarkan hasil penelitian ini terkait strategi komunikasi yang dilakukan KPU Kabupaten Boyolali untuk meningkatkan partisipasi aktif Pemilu dengan memahami terkait karakteristik dari pemilih pemula terkait kebutuhan mereka. Sehingga, dalam analisisnya, pendidikan politik sangat dibutuhkan bagi mereka guna mengarahkan pelaksanaan demokrasi yang stabil dan keikutsertaan pemilih pemula dari seluruh golongan dapat memenuhi tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang baik. Posisi KPU Kabupaten Boyolali dapat dikonstruksikan sebagai lembaga yang informatif dalam menyampaikan pesan politik yang kredibilitas dengan alur penyampaian yang menyenangkan. Dengan demikian, pendekatan yang dipilih melalui pendidikan politik sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Boyolali agar memahami peran pentingnya dalam menjaga stabilitas demokrasi, dengan memebuhi tanggung jawab sebagai warga negara yang bijaksana.

Berdasarkan dengan pembahasan yang komprehensif KPU Kabupaten Boyolali merespons kebutuhan masyarakat dengan memfasilitasi partisipasi aktif yang lebih luas. Kegiatan tersebut mencakup inisiatif dalam memberikan akses informasi yang lebih baik terkait pendidikan politik yang efektif dan kebijakan partisipasi yang dapat memberikan keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Fokus pembahasan yang ditempatkan pada setiap prosesnya sehingga kegiatan Pendidikan politik ini berhasil mengalami peningkatan dalam representasi publik dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang ada di daerah lokal.

Peran KPU Kabupaten Boyolali digambarkan sebagai lembaga yang tidak hanya memberikan ruang yang nyaman bagi penyampaian pesan oleh KPU Kabupaten Boyolali sebagai komunikator secara garis besar dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dengan situasi sosial yang ada di lingkungan tersebut, dalam prosesnya melaksanakan program

Car Free Day (CFD), Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, Sosialisasi Rancangan Penyederhanaan Surat Suara Pemilu Tahun 2024, kegiatan KPU *Goes to School*, dan Kirab Budaya Pemilu 2024. Pesan diterima oleh khalayak sesuai dengan pemahaman personal masing-masing dari pemilih pemula. Terkait dengan alurnya, menyesuaikan dengan alur komunikasi yang direncanakan sesuai dengan kondisi masyarakat dengan komunikasi media dalam bentuk media sosial. Kaitannya dengan bentuk partisipasi pemilih, KPU Kabupaten Boyolali sebagai mitra penyelenggara diyakini menjadi agen penyaluran informasi politik terkait Pemilu Legislatif. Fungsi sosial yang ada pada konseptualisasi diri dapat mengukuhkan budaya demokrasi dan interpretasi makna dari lingkungan yang diperoleh dan dibutuhkan.

BIBLIOGRAFI

- Adistyananingsih, D. P., Anak, D., Gede, A., & Wisnumurti, O. (2019). Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Meningkatkan Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gianyar How to cite (in APA style). *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(2), 60–64. <https://doi.org/10.22225/sintesa.10.2.1531.60-64>
- Affandi, F. N., Sulistyarningsih, T., Si, M., Hijri, Y. S., Ip, S., & Ip, M. (n.d.). *PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK GENERASI MUDA*.
- Anwar, K., Novalina, S., Anwar, K., Hasibuan, L., & Suryani, D. (2021). The Role of Education Politics as a Foundation in Developing Curriculum and Educational Techniques in Indonesia. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 13(1), 136–143. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v13i1.410>
- Ardani Putram, F., & Fauzi, A. (2020). Komunikasi KPU dalam Menekan Golput di Jember. In *Ahmad Fauzi* | (Vol. 18, Issue 2). <http://alhikmah.iain-jember.ac.id/>
- Asri, I., Pusdiklat, W., Kementerian, T. A., & Ri, A. (2022). STRATEGI KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM MEMBANGUN SEMANGAT KERJA PEGAWAI PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI KEMENTERIAN AGAMA RI. *Universitas Persada Indonesia Y.A.I*), 3, 267.
- Bakhri, S. (2021). *Ilmu Komunikasi* (S. Bakhri, Ed.). Zahir Publishing.
- Cangara, H. (2016). *Komunikasi Politik, Konsep, Teori, dan Strategi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Carvalho, S., & Dryden-Peterson, S. (2024). Political economy of refugees: How responsibility shapes the politics of education. *World Development*, 173, 106394. <https://doi.org/10.1016/J.WORLDDEV.2023.106394>

- Drew, C. (2023). *Lasswell's Model Of Communication-5 Key Features The 5 Components Of The Lasswell Model Of Communication*. <https://helpfulprofessor.com/lasswell-model-of-communication/1/18>
- Heryanto, G. G. (2018). *Media Komunikasi Politik* (D. A. Giddan & S. Rumaru, Eds.). IRCiSoD.
- Huntington, S. P. S. S. N. J. M., Simamora, S., & Nelson, J. M. (2013). *No easy choice : participation in developing countries*. Rineka Cipta.
- Iskandar, D., & Marlina, N. (2019). *PENDIDIKAN PEMILIH MUDA CERDAS DI BOYOLALI* (Vol. 01, Issue 01). www.Kompas.com.
- J.Moleong, L. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Junaedi, F. (2019). *Komunikasi Politik: Teori, Aplikasi, dan Strategi di Indonesia* (Kedua). Buku Litera .
- Kantaprawira, R. (2006). *Sistem Politik Indonesia (Model Suatu Pengantar)* (Cetakan 9). Sinar Baru Algensindo.
- Kusnardi, Moh., & Ibrahim, H. (2010). *Pengantar hukum tata negara Indonesia*. Sinar Bakti.
- Lasswell, H. (1960). *The Structure and Function of Communication in Society (Mass Communication)* (W. Schamm, Ed.). Urbana: University of Illinois Press.
- Macrae, C. (2004). Literature, Satire and the Early Stuart State. In *Political Literacy Resource Pack*. United States of America by Cambridge University.
- McNair, B. (2010). *Introduction to Political Communication 2nd Edition*.
- Nimmo, D. (n.d.). *Komunikasi politik: Komunikator, Pesan, dan Media* (T. S. Jalaluddin Rakhmat, Ed.). Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, Dan. (2010). *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek*. . Rosda Karya.
- P. Pureklolon, T. (2016). *Komunikasi Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Pedesaan, M., Gustina Zainal, A., & Sarwoprasodjo, S. (n.d.). *Anna Gustina Zainal, Sarwititi Sarwoprasodjo MetaCommunication; Journal Of Communication Studies*.
- Rahman, A., & Munadi, K. (2019). Communicating Risk in Enhancing Disaster Preparedness: A Pragmatic Example of Disaster Risk Communication Approach from the Case of Smong Story. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 273(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/273/1/012040>

Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali Melalui Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih

- Ruliana, P., & Lestari, P. (2019). *Teori Komunikasi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sari, E. A., & Farid, M. R. A. (2021). Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Saat Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Communication Strategy of the General Election Commission of Bantul Regency in Disseminating the Implementation of Regional Head Elections During the 2020 Covid-19 Pandemic. *Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(2), 27. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v3i2.611>
- SETKAB, K. B. P. (2022, January 28). *Partisipasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Peningkatan Kualitas Politik di Indonesia* . Setkab.Go.Id. <https://setkab.go.id/partisipasi-partai-politik-dan-organisasi-kemasyarakatan-dalam-peningkatan-kualitas-politik-di-indonesia/>
- Sobur, A. (2001). *Analisis Teks Media* . Remaja Rosdakarya.
- Subiakto, H. dan I. Rachmah. (2015). *Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi*. Kencana.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta .

Copyright Holder:

Raihana Lutfiah Nabila, Sarbini (2023)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

